

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

- Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Agus Kasiyanto, 2018, *Teori dan Praktik Siste Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan etodologi Penelitian Hukum Normaif*, Banyumedia, Malang
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010, *Memahami Gratifikasi (Cetakan Pertama)*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014, *Memahami Gratifikasi (Cetakan Kedua)*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta
- Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung
- Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rasamala Aritonang *et al*, *Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta,

Rodliyah dan Salim, 2019, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Rajawali Pers, Depok

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Kajian Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta

Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B.PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).

A.JURNAL

- Ahmad Fahd Budi Suryanto, (2021), *Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia*, Dharmasisya, Vol. 1, No. 2, 589-600
- David Daniel Paruntu, (2014), *Tolak Ukur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi*, Lex Crimen, Vol. 3, No. 2, 42-53
- Fariaman Laia, (2022), *Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan*, Jurnal Panah Keadilan, Vol. 1, No. 2, 1-16, DOI: <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i4.251>
- Ricardo Lalu, (2019), *Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesia*, Lex Crimen, Vol. 8, No. 5, 28-35
- Risang Pujiyanto, Netti Iriyanti dan Sonny Taufan, “Tinjauan yuridis persyaratan akreditasi dalam pengadaan pegawai negeri sipil”, *Ius Quia Lustum*, Vol. 25, No. 3, 586-587

B. SKRIPSI

Fidorayuci Wahalindra, 2016, *Aspek Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi*, Skripsi, Program Sarjana hukum universitas Sriwijaya, Palembang

Dirga Pratama, “Analisa kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan kantor walikota dumai bagian umum”, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru,

C. INTERNET

Annisa, Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya, fahum umsu, Juli 26, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

Ilham Zaman, Perbedaan Pidana Umum dan Pidana Khusus, pinter hukum, Mei 14, 2023, <https://pinterhukum.or.id/perbedaan-pidana-umum-dan-pidana-khusus/>

Si Manis, Pengertian Tindak Pidana: Unsur, Syarat, jenis dan Contoh Tindak Pidana, Pelajaran, Januari 17, 2024, <https://www.pelajaran.co.id/tindak-pidana/>

D. LAIN-LAIN

Wawancara Dengan Zalmianto Agung Saputra, S.H.,
M.H., CSSL. , Selaku Jaksa Pidana Khusus
Pada Kejaksaan Tinggi Kota Surabaya
Mengeni Bagaimana Hukuman Terhadap
Pegawai Negeri Sipil Yang Terbukti Melakukan
Tindak Pidana Gratifikasi Pada Tanggal Pada
Tanggal 17 Juli 2024